

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Republik Indonesia atau yang lebih umum dikenal Indonesia adalah negara yang terletak di Asia Tenggara yang dilalui oleh garis Khatulistiwa dan berada di antara benua Asia dan benua Australia serta samudera Hindia dan Pasifik. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia dengan jumlah pulau sebanyak 17.504 pulau. Dengan populasi lebih dari 263 juta jiwa, menjadikan Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar ke-4 di dunia setelah Tiongkok, India, dan Amerika Serikat.

Bentuk pemerintahan Indonesia adalah republik, dengan Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dipilih secara langsung oleh rakyat setiap lima tahun sekali, negara Indonesia bila dipandang dari bentuk pemerintahan dan politiknya, maka negara Indonesia menjalankan sistem presidensial multipartai yang demokratis. Sama halnya dengan negara-negara demokrasi lainnya yang ada di dunia, sistem politik Indonesia berdasarkan pada asas Trias politika, yaitu eksekutif, legislative, dan yudikatif.¹

¹ <https://perpustakaan.id/profil-negara-indonesia/> diakses pada 18 juli 2018

Selain menjadi salah satu pendiri organisasi ASEAN, Indonesia juga menjadi anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sejak 28 September 1950, Indonesia menjadi anggota resmi PBB ke-60. Hal tersebut terjadi kurang dari setahun setelah pengakuan kedaulatan oleh Belanda melalui Konferensi Meja Bundar. Indonesia dan PBB memiliki keterikatan sejarah yang kuat mengingat kemerdekaan Indonesia yang diproklamasikan pada tahun 1945 bertepatan dengan berdirinya PBB dan semenjak itu pula PBB secara konsisten mendukung Indonesia untuk menjadi negara yang merdeka, berdaulat, dan mandiri. Ketika terjadi Agresi militer Belanda I, Indonesia dan Australia mengusulkan agar persoalan Indonesia dibahas dalam Sidang Umum PBB.

Selanjutnya, PBB membentuk Komisi Tiga Negara yang membawa Indonesia dan Belanda ke meja perundingan Renville. Ketika terjadi Agresi Belanda II, PBB membentuk UNCI yang mempertemukan Indonesia dengan Belanda dalam Roem Royen.² Indonesia keluar dari PBB pada 20 Januari 1965 melalui presiden Soekarno. Pada 19 September 1966 Indonesia mengajukan permohonan agar dapat kembali menjadi anggota PBB. Permohonan tersebut diterima pada 28 September 1966 oleh Majelis Umum PBB dan sejak itu Indonesia terhitung menjadi anggota PBB kembali.

² <https://www.kemlu.go.id/id/kebijakan/kerjasama-multilateral/Pages/Perserikatan-Bangsa-Bangsa.aspx> diakses pada 19 Juli 2018

Perserikatan Bangsa-Bangsa adalah salah satu organisasi internasional yang bersifat global yang terpenting masa kini.³ Hal yang menjadi langkah awal terbentuknya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) ini adalah saat Perdana Menteri Inggris, Winston Churchill dan Presiden Amerika Serikat, Franklin Delano Roosevelt, mengadakan pembicaraan khusus yang menghasilkan deklarasi tentang hak kebebasan, kemerdekaan dan, perdamaian dunia.⁴

Tujuan didirikannya Perserikatan Bangsa-Bangsa itu sendiri seperti yang tercantum dalam Preambule yaitu :

- a) Menyelamatkan generasi mendatang dari bencana perang.
- b) Memperteguh kepercayaan pada hak-hak asasi manusia, harkat dan derajat diri manusia dan persamaan hak bagi pria dan wanita, serta bagi semua bangsa baik besar maupun kecil.
- c) Menciptakan keadaan yang memungkinkan terpeliharanya keadilan dan penghormatan kewajiban yang timbul dari perjanjian internasional dan sumber hukum internasional yang lain.
- d) Mendorong kemajuan sosial dan tingkat kehidupan yang lebih baik.⁵

³ Sugeng Istanto, *Hukum Internasional*, Penerbitan Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 1994, hal.127.

⁴ journal.unas.ac.id/index.php/ilmu-budaya/article/download/39/28 tinjauan umum mengenai dewan keamanan, diakses pada tanggal 21 september 2018

⁵ Sugeng Istanto, *Op.Cit.*, hlm.129-130

Dalam melaksanakan tujuan-tujuan tersebut di atas, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) membaginya dalam 6 organ utama yaitu, Majelis Umum, Dewan Keamanan, Dewan Ekonomi dan Sosial, Dewan Perwalian, Mahkamah Internasional, dan Sekretariat. Dari 6 organ utama tersebut, Dewan Keamanan PBB bertugas melaksanakan perdamaian dunia, baik dengan negara-negara anggota PBB maupun bukan negara anggota, selama mengancam perdamaian dunia.⁶

Berlawanan dengan sikap Presiden Soekarno yang anti imperialisme. Hubungan luar negeri Indonesia pada zaman orde baru didasarkan pada ekonomi dan kerja sama politik dengan negara barat. Dengan masuknya Indonesia menjadi DK PBB pada masa pemerintahan Presiden Soeharto pada tahun 1973-1974 dan 1995-1996. Dan pasca reformasi pun Indonesia menjadi DK PBB pada 2007-2008 dan terbaru Indonesia kembali terpilih pada era kepemimpinan Presiden Jokowi dan mulai aktif pada awal tahun 2019.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Indonesia, Arrmanatha Christiawan Nasir, ada alasan penting mengapa Indonesia mencalonkan diri sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan (DK) PBB. Indonesia ingin menjadi anggota tidak tetap DK PBB periode 2019-2020. Menurutnya, dengan menjadi anggota tidak tetap DK PBB, peran

⁶ May Rudy, *Hukum Internasional II*, PT. Refika Aditama, Bandung, 2002, hal.102

Indonesia di kancah dunia akan lebih mendapat pengakuan, khususnya dalam menjaga perdamaian dunia.

*"Keberhasilan untuk terpilih menjadi anggota tidak tetap DK PBB sendiri merupakan pengakuan dari negara lain terhadap kontribusi negara tersebut terhadap perdamaian, dan juga kontribusi negara tersebut untuk menjaga perdamaian dunia, beberapa manfaat Indonesia menjadi anggota tidak tetap DK PBB ialah, Indonesia bisa lebih banyak berbicara dan menunjukkan sikapnya dalam berbagai isu dunia. dalam sistem PBB, berbagai isu penting, berbagai isu yang menjadi fokus perhatian dunia itu awalnya dibahas di DK PBB."*⁷

Pada Sidang Umum PBB tanggal 22 September 2016, Indonesia melalui Wakil Presiden Jusuf Kalla dengan didampingi Menteri Luar Negeri Retno L.P. Marsudi dan Wakil Tetap RI di New York Duta Besar Dian Triansyah Djani menyatakan pencalonan Indonesia untuk menjadi anggota tidak tetap DK PBB periode 2019-2020.

Sebagaimana tercantum dalam preambule Undang-Undang Dasar 1945, Indonesia memiliki cita-cita untuk melaksanakan ketertiban dunia. Agar tercapainya cita-cita tersebut, Indonesia selalu berusaha memberikan kontribusi yang nyata bagi terciptanya perdamaian dunia. Dalam pencalonan Indonesia menjadi anggota tidak tetap DK PBB periode 2019-2020, Indonesia memiliki beberapa keuntungan, diantaranya : Indonesia

⁷ <https://international.sindonews.com/read/1135863/40/alasan-indonesia-ingin-jadi-anggota-tak-tetap-dk-pbb-1472718354> diakses pada 30 juni 2018

merupakan negara berpenduduk keempat terbesar dunia, negara demokrasi terbesar ketiga dunia. Indonesia merupakan bukti bahwa perbedaan tidak menjadi penghalang bagi terciptanya suatu perdamaian. Selain itu, Indonesia merupakan salah satu penyumbang pasukan pemelihara perdamaian PBB terbanyak.⁸

Menurut Arrmanantha Nassir selaku juru bicara Kementerian Luar Negeri Indonesia, Maladewa merupakan saingan yang berat bagi Indonesia, karena sebagai negara yang baru pertama kali mencalonkan diri pada pemilihan DK PBB, Maladewa dianggap dapat memberikan semangat baru dalam DK PBB, yang mana hal tersebut menjadi daya tarik negara-negara yang baru mencalonkan diri. Tantangan lainnya bagi Indonesia adalah eksistensi Maladewa pada organisasi internasional, khususnya PBB.

Maladewa menjadi ketua *Alliance for Small Island States* (AOSIS)⁹, anggota *United Nations Human Rights Council* atau dewan hak asasi, dan *Executive Board* dari *United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women* (UN Women).¹⁰ Oleh karena itu, Indonesia memerlukan upaya lebih dalam pencalonannya menjadi anggota tidak tetap DK PBB periode 2019-2020.

⁸ Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, 2016

⁹http://www.maldivesmission.com/index.php?option=com_content&view=article&id=230&Itemid=81 diakses pada 5 juli 2018

¹⁰ http://maldivesmission.com/index.php?option=com_content&view=article&id=1168:the-maldives-urges-membership-of-the-security-council-should-come-from-both-developing-and-developed-countries-including-small-states&catid=3:newsflash diakses pada 5 juli 2018

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan di atas, penulis merumuskan masalah sebagai berikut, yaitu “ *Mengapa Indonesia Berdiplomasi Untuk Menjadi Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa Periode 2019-2020 ?*”.

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui alasan dari Indonesia melakukan diplomasi untuk menjadi anggota Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada periode 2019-2020.

D. Landasan Teori

Untuk mengetahui alasan Indonesia diplomasi dalam upaya menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) pada periode 2019-2020 mendatang, penulis akan menggunakan Konsep Diplomasi.

Banyak yang mendefinisikan kata “diplomasi” dengan pendapat mereka masing-masing, walaupun berbeda-beda tetapi inti dari pandangan mereka saling berkaitan dan memiliki kesamaan. Diplomasi yang sangat erat dihubungkan dengan hubungan antar negara, adalah suatu seni yang mengedepankan kepentingan suatu negara melalui negosiasi dengan cara-cara damai apabila mungkin, dalam berhubungan dengan negara lain. Diplomasi memperbolehkan pengguna ancaman atau kekuatan nyata

sebagai cara untuk mencapai tujuan-tujuannya, apabila cara damai yang dilaksanakan gagal untuk memperoleh tujuan yang diinginkan.

Barston juga mendefinisikan diplomasi sebagai manajemen hubungan antar negara atau hubungan antar negara dengan aktor-aktor hubungan internasional lainnya. Suatu Negara akan berusaha untuk menyampaikan, mengkoordinasi, dan mengamankan kepentingan nasionalnya yang bersifat khusus atau yang lebih luas, dalam pelaksanaannya, negara diwakili oleh perwakilan resmi dan aktor-aktor lain. Segala kegiatan tersebut dilakukan melalui korespondensi, kunjungan, saling menyampaikan pandangan, pembicaraan tidak resmi, lobi, dan aktivitas-aktivitas lainnya¹¹.

Djelantik dalam bukunya, memberikan definisi yang terdekat dengan metode dan isi diplomasi. Menurutnya, Diplomasi mewakili tekanan politik, ekonomi dan militer pada negara-negara yang terlibat dalam aktivitas diplomasi tersebut, yang dilakukan melalui pertukaran permintaan dan konsesi antar pelaku negosiasi. Diplomasi juga dapat dilaksanakan dalam pertemuan khusus atau konferensi umum. Diplomasi juga dapat diartikan sebagai upaya untuk merubah kebijakan, tindakan, tujuan, dan sikap pemerintahan negara lain dan diplomat-diplomatnya melalui persuasi, menawarkan penghargaan, saling mempertukarkan

¹¹Sukarwisini Djelantik, 2012, DIPLOMASI ANTARA TEORI DAN PRAKTIK, Yogyakarta, Graha Ilmu, hal 25

konsesi, atau mengirimkan ancaman.¹² Diplomasi dapat dilakukan dalam kerangka bilateral maupun multilateral melalui persuasi, penawaran penghargaan atau imbalan, atau ancaman.

Diplomasi berkaitan erat dengan politik luar negeri, sebab diplomasi adalah implementasi dari kebijakan luar negeri yang direncanakan oleh pejabat-pejabat yang terlatih. di banyak Negara, kebijakan luar negeri dibuat dan diformulasikan Menteri Luar Negeri dan Departemen Luar Negeri. Pelaksanaan diplomasi bilateral maupun multilateral sekaligus kegiatan sehari-hari dilaksanakan oleh para diplomat dan perwakilan yang bertempat di luar negeri maupun organisasi internasional. Tujuan dari diplomasi sendiri dapat dinilai dari keberhasilan mencapai dalam mencapai tujuan awalnya. Diplomat melakukan diplomasi untuk mencapai kepentingan nasionalnya dengan cara saling menukar informasi secara terus menerus/berkelanjutan dengan Negara lain atau rakyat di Negara lain. Tujuan persuasif antar Negara adalah untuk merubah sikap dan tingkah laku lawannya.¹³

Nicholson yang merupakan salah seorang pengkaji dan praktisi diplomasi menyatakan bahwa ada empat hal penting yang bersangkutan dengan diplomasi. Hal yang pertama adalah politik luar negeri, yang kedua, negosiasi, ketiga, mekanisme pelaksanaan negosiasi, keempat, suatu cabang dinas luar negeri. Diplomasi cenderung mengarah pada

¹² Sir Ernest Satow, *A Guide to Diplomatic Practice*, Longman Green & Co, NY, 1922, hal 1

¹³ *Ibid* hal.13

wawasan untuk mengatur perilaku para aktor Negara dalam sistem internasional melalui instrumen-instrumen yang ada.

E. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif dengan berdasarkan pada data yang muncul berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka. Sedangkan penelitian deskriptif artinya melukiskan variabel demi variabel, satu demi satu. Metode penelitian deskriptif bertujuan untuk :

1. Mengumpulkan informasi aktual secara rinci yang melukiskan gejala yang ada.
2. Mengidentifikasi masalah atau memeriksa kondisi dan praktek-praktek yang berlaku.
3. Membuat perbandingan atau evaluasi.

Metode deskriptif pada hakekatnya adalah metode untuk mencari teori, bukan menguji teori.¹⁴

2. Jenis Data dan Sumbernya

Jenis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah jenis data primer dan jenis data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dari sumber langsung dari actor-aktor terkait misalnya aktor

¹⁴ M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Cet. 1 (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hal. 22.

negara. Data sekunder merupakan data yang di peroleh dari berbagai literatur.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah studi dokumen dengan cara mengumpulkan berbagai macam sumber informasi dari berbagai literatur yang berhubungan langsung dengan masalah penelitian. Sumber literatur tersebut diantaranya: buku, jurnal, dokumen, makalah, surat kabar, artikel dan internet.

4. Teknik Analisa Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu menggunakan analisis data kualitatif dengan urutan :

- a) Reduksi Data, yaitu proses menyempurnakan data, baik mengurangi data yang dirasa kurang relevan maupun menambah data yang dirasa masih kurang.
- b) Penyajian Data, Penyajian data di sini sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data ini berbentuk teks naratif, sebagai informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan.
- c) Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi Data. Proses ini dijelaskan bagaimana mulai mencari makna terkait faktor pendorong Indonesia berdiplomasi guna menjadi DK tidak tetap PBB.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mendapatkan hasil penelitian secara sistematis dan mempermudah pembaca dalam memahami hasil penelitian ini, maka penulisan skripsi dengan judul “*Mengapa Indonesia Melakukan Diplomasi Dalam Rangka Untuk Menjadi Anggota Dewan Keamanan Tidak Tetap Perserikatan Bangsa-Bangsa Periode 2019 – 2020 ?*” ini dibagi menjadi empat bab dengan kerangka sebagai berikut :

BAB I merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, landasan teori, hipotesa, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II merupakan gambaran umum diplomasi Indonesia dalam rangka menjadi Dewan Keamanan Tidak Tetap Perseikatan Bangsa-Bangsa periode 2019-2020. Sejarah Indonesia dalam keanggotaan PBB dan hubungan-hubungan Indonesia dengan negara maupun organisasi internasional lainnya dalam rangka menjadi DK tidak tetap PBB.

BAB III merupakan kepentingan Indonesia menjadi DK tidak tetap PBB 2019-2020 yang juga memuat kontribusi Indonesia pada dunia internasional, melalui analisis penggunaan teori.

BAB IV adalah bagian penutup yang memuat kesimpulan dan saran.